

Relasi Patron-Klien dan Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Ekas Buana, Lombok Timur

Irwan Efendi

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

E-mail: irwan.efendi.student@hamzanwadi

Abdullah Muzakar

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

E-mail: abdullahmuzakar@hamzanwadi.ac.id

M. Zainul Asror*

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

E-mail: mz.asror@hamzanwadi.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 28-04-2023, Revised: 16-06-2023, Accepted: 21-06-2023,
Published: 30-06-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi patron-klien dan ketimpangan ekonomi antara pemilik modal dan masyarakat nelayan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang, terdiri atas dua pemilik modal dan delapan masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi ekonomi dibentuk oleh penguasaan kapal dan alat tangkap, penetapan aturan kerja, pembagian hasil 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk nelayan, serta penguasaan pemasaran hasil tangkapan. Ketergantungan semakin kuat ketika nelayan memerlukan pinjaman untuk biaya melaut dan kebutuhan rumah tangga pada musim paceklik. Pendapatan nelayan dari kegiatan melaut berada pada kisaran Rp100.000–Rp150.000 per hari, sedangkan biaya operasional sekitar Rp100.000 per hari. Kondisi tersebut membuat pendapatan bersih sangat bergantung pada jumlah tangkapan, musim, dan cuaca. Nelayan merespons ketidakpastian melalui pekerjaan sampingan, tabungan, pinjaman pemilik modal, dan akses KUR. Temuan memperlihatkan bahwa hubungan tersebut bersifat resiprokal karena kedua pihak saling membutuhkan, tetapi asimetris karena sumber daya produksi, informasi pasar, dan kewenangan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada pemilik modal.

Kata Kunci:

ketimpangan ekonomi; nelayan; patron-klien; pemilik modal

Abstract

This study aims to analyze patron-client relations and economic inequality between capital owners and fishing communities in Ekas Buana Village, Jerowaru District, East Lombok Regency. The study employed a descriptive qualitative approach using data obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Ten informants participated, consisting of two capital owners and eight fishermen. The findings show that economic relations are shaped by ownership of boats and fishing equipment, the determination of work rules, a profit-sharing arrangement of 70% for capital owners and 30% for fishermen, and control over the marketing of catches. Dependence becomes stronger when fishermen need loans for fishing operations and household needs during lean seasons. Fishermen's daily income from fishing ranges from approximately IDR 100,000 to IDR 150,000, while operational costs are around IDR 100,000 per day. Consequently, net income depends heavily on catch volume, season, and weather. Fishermen respond to uncertainty through secondary occupations, savings, loans from capital owners, and access to KUR. The findings indicate that the relationship is reciprocal because both parties need each other, yet asymmetric because productive resources, market information, and economic authority are concentrated more strongly in the hands of capital owners.

Keywords:

capital owners; economic inequality; fishermen; patron-client



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut melalui penangkapan ikan, pengolahan, perdagangan, dan pekerjaan pendukung. Karakter produksi perikanan yang dipengaruhi musim, cuaca, gelombang, ketersediaan ikan, kondisi kapal, alat tangkap, bahan bakar, serta akses pasar membuat pendapatan nelayan bersifat tidak pasti. Halim et al. (2019) menempatkan perikanan skala kecil sebagai kegiatan ekonomi yang sangat terkait dengan karakteristik sumber daya, kapasitas produksi, dan tata kelola. Pada saat yang sama, keberlanjutan penghidupan nelayan juga dipengaruhi akses terhadap modal, pasar, kelembagaan, dan strategi rumah tangga (Stacey et al., 2019; Stacey et al., 2021).

Ketidakpastian produksi tersebut membuat kerentanan ekonomi nelayan berbeda dari kelompok pekerja dengan waktu dan pendapatan yang lebih tetap. Perubahan kondisi sumber daya dan cuaca dapat mengurangi hari melaut, hasil tangkapan, serta penerimaan rumah tangga. Warren dan Steenbergen (2021) menunjukkan penurunan sumber daya perikanan dapat berkelindan dengan persoalan penghidupan dan tata kelola lokal. Temuan tentang kerentanan pesisir juga memperlihatkan bahwa kemampuan rumah tangga menghadapi risiko dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sumber daya yang tersedia, dan pilihan strategi penghidupan (Azizi et al., 2017; Gravitiani et al., 2018; Hafsaridewi et al., 2019; Rahman et al., 2021).

Persoalan ekonomi nelayan karena itu tidak cukup dipahami melalui besarnya pendapatan. Selain itu, pentingnya pembangunan ekonomi masyarakat pesisir yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakter sumber daya lokal (Habibuddin et al., 2023; Rukin, 2020). Sementara Stacey et al. (2017) juga memperlihatkan perubahan pengelolaan sumber daya laut dapat berdampak pada penghidupan dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Dengan kerangka tersebut, akses terhadap alat produksi, pembiayaan, pasar, dan jaringan sosial menjadi bagian

penting dalam menjelaskan mengapa sebagian nelayan memiliki pilihan ekonomi lebih terbatas dibandingkan aktor lain dalam rantai perikanan.

Penelitian terdahulu menunjukkan salah satu persoalan utama dalam ekonomi nelayan adalah ketimpangan penguasaan sarana produksi. Perbedaan kepemilikan kapal, alat tangkap, modal operasional, dan jaringan pemasaran menempatkan pemilik modal dan nelayan pada posisi yang berbeda. Dalam hubungan kerja nelayan, pihak yang menguasai sarana produksi memiliki kemampuan lebih besar menentukan kegiatan produksi, sedangkan pihak yang menyediakan tenaga bergantung pada akses terhadap sarana tersebut. Pola ini terlihat dalam kajian tentang hubungan nelayan dan pemasok di Kema serta strategi kelompok nelayan dalam menghadapi politik patron-klien di Maros (Humbas et al., 2021; Chalid & Manji, 2021).

Relasi tersebut dalam banyak kajian dijelaskan melalui konsep patron-klien. Al-Ayubi et al. (2017) menunjukkan hubungan patron-klien dalam masyarakat nelayan dapat dibangun melalui pertukaran pekerjaan, bantuan ekonomi, dan perlindungan yang disertai kewajiban tertentu. Hubungan tidak selalu dibentuk melalui kontrak formal, melainkan dapat bertahan melalui kepercayaan, kedekatan, kebutuhan ekonomi, dan pertukaran yang berlangsung berulang. Adisel et al. (2023) memperlihatkan bahwa hubungan kerja nelayan dan pemilik sumber daya dapat mengandung unsur saling membutuhkan, tetapi tetap memperlihatkan perbedaan posisi dan kewenangan.

Aspek penting dari penelitian patron-klien merupakan hubungan timbal balik tidak otomatis menghasilkan kesetaraan. Suleman et al. (2019) mengaitkan hubungan patron-klien dengan kemiskinan struktural ketika akses terhadap modal dan sumber penghidupan terkonsentrasi pada pihak tertentu. Dalam perspektif kelas sosial, penguasaan alat produksi menjadi sumber pembentukan posisi yang berbeda dalam proses ekonomi. Hendriwani (2020) menjelaskan analisis Marxis memberi perhatian pada hubungan antara kelas dan penguasaan alat produksi, sedangkan Syahrizal (2019) menunjukkan bahwa ketimpangan dalam masyarakat nelayan juga berkaitan dengan sistem pembagian hasil. Dengan demikian, posisi ekonomi nelayan perlu dilihat dari kombinasi kepemilikan, kewenangan, dan distribusi hasil, bukan pendapatan semata.

Penelitian mengenai rantai nilai memperluas pembahasan tersebut dengan menempatkan pemasaran sebagai sumber kekuasaan ekonomi. Roberts et al. (2022) menemukan bahwa hubungan patron-klien dapat membentuk rantai nilai perikanan karena patron menghubungkan pembiayaan, produksi, dan pemasaran. Aktor yang menguasai lebih dari satu mata rantai memiliki posisi tawar lebih kuat dalam menentukan aliran hasil dan hubungan perdagangan. Anna et al. (2019), melalui kajian kesejahteraan nelayan, juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nelayan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan, tetapi dengan kondisi kehidupan dan pilihan yang tersedia bagi rumah tangga. Temuan tersebut penting untuk membaca pemasaran bukan sekadar proses menjual ikan, melainkan sebagai ruang distribusi informasi dan manfaat ekonomi.

Pembiayaan informal merupakan dimensi lain yang memperkuat hubungan patron-klien. Nelayan membutuhkan modal untuk bahan bakar, alat tangkap, perbaikan sarana, dan kebutuhan rumah tangga ketika hasil tangkapan menurun. Manzilati dan Prestianawati (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan informal dapat menjadi pilihan karena relatif mudah dijangkau kelompok yang menghadapi keterbatasan akses keuangan formal. Namun, kemudahan tersebut dapat berubah menjadi keterikatan ketika pinjaman dihubungkan dengan transaksi ekonomi lain. Leniwati et al. (2023) memperlihatkan bahwa utang dalam perspektif patron-klien

dapat mempunyai dimensi sosial karena kewajiban pembayaran berkelindan dengan hubungan kerja dan pertukaran sosial.

Sistem bagi hasil juga menjadi perhatian penting dalam penelitian terdahulu. Silmi et al. (2018) menunjukkan pola bagi hasil dalam usaha penangkapan perlu dibaca bersama struktur biaya dan kontribusi masing-masing pihak. Widiastuti dan Rosyidah (2018) menempatkan pembagian hasil dalam kaitannya dengan struktur usaha dan risiko, sedangkan Wafi et al. (2019) menunjukkan hubungan antara sistem bagi hasil, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan. Qurrata (2018) melihat hubungan patron-klien dalam perikanan melalui mekanisme kontraktual yang mempertemukan modal dan tenaga. Kajian-kajian tersebut menegaskan persentase bagi hasil tidak berdiri sendiri; maknanya bergantung pada siapa yang menyediakan modal, menanggung biaya, mengendalikan keputusan, dan memperoleh informasi mengenai hasil penjualan.

Penelitian tentang penghidupan nelayan selanjutnya menunjukkan rumah tangga merespons ketidakpastian melalui diversifikasi dan strategi adaptasi. Nissa et al. (2018) dan Saksono et al. (2023) memperlihatkan pentingnya strategi penghidupan ketika sumber pendapatan utama menghadapi keterbatasan. Nissa et al. (2019) menekankan kerentanan rumah tangga nelayan, sementara Suadi et al. (2021) menyebutkan pilihan strategi berbeda sesuai karakter sumber daya perikanan dan lingkungan tempat nelayan hidup. Stacey et al. (2019) dan Subair et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa penghidupan rumah tangga pesisir dibentuk oleh kemampuan melakukan diversifikasi pekerjaan dan memanfaatkan sumber daya di luar perikanan. Campbell et al. (2021) memperkuat gambaran guncangan eksternal dapat segera memengaruhi kegiatan dan penghidupan masyarakat perikanan skala kecil.

Jika dibandingkan, penelitian terdahulu telah menjelaskan patron-klien dari beberapa sisi: kelembagaan dan pertukaran sosial, penguasaan alat produksi, sistem bagi hasil, rantai nilai, pembiayaan informal, serta strategi penghidupan. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti satu atau beberapa mekanisme secara terpisah. Masih diperlukan kajian yang menghubungkan kepemilikan sarana produksi, aturan kerja, bagi hasil, penguasaan informasi pemasaran, pinjaman, pendapatan, biaya operasional, dan strategi rumah tangga dalam satu rangkaian relasi ekonomi pada tingkat lokal. Ruang inilah yang menjadi posisi penelitian di Desa Ekas Buana. Kajian ini tidak sekadar melihat adanya hubungan patron-klien, tetapi menjelaskan bagaimana berbagai mekanisme tersebut saling menguatkan dalam membentuk ketergantungan dan ketimpangan ekonomi.

Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, memperlihatkan konteks empiris yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Data Pemerintah Desa Ekas Buana tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk 3.295 jiwa, terdiri atas 1.459 laki-laki dan 1.836 perempuan. Dari penduduk laki-laki tersebut, 239 orang tercatat bekerja sebagai nelayan. Struktur mata pencaharian ini menegaskan perikanan merupakan salah satu sumber penghidupan penting, sehingga perubahan kondisi laut berpotensi langsung memengaruhi rumah tangga nelayan. Dalam konteks masyarakat pesisir, keragaman sumber penghidupan dan keterbatasan akses produksi dapat membentuk stratifikasi ekonomi berdasarkan kepemilikan sarana, modal, dan akses pasar (Nissa et al., 2018; Saksono et al., 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Irwan Efendi menemukan hubungan pemilik modal dan nelayan di Desa Ekas Buana berlangsung melalui kerja sama penangkapan, penyediaan modal, dan penjualan hasil tangkapan. Pemilik modal menyediakan kapal dan kebutuhan operasional, sedangkan nelayan menjalankan kegiatan penangkapan. Aturan kerja berlangsung secara lisan dan ditopang komunikasi serta kepercayaan.

Pola tersebut sejalan dengan karakter hubungan kerja nelayan yang ditemukan dalam kajian Adisel et al. (2023) dan Humbas et al. (2021), tetapi penelitian ini memperluas perhatian pada keterkaitan antara kerja, pemasaran, utang, dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan kewenangan. Pemilik modal menguasai sarana produksi dan pembiayaan, sedangkan nelayan membutuhkan kapal, alat tangkap, serta modal untuk bekerja. Pembagian hasil yang ditemukan adalah 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk nelayan. Hasil tangkapan kemudian dipasarkan oleh pemilik modal ke luar desa sehingga nelayan memiliki akses terbatas terhadap informasi harga dan penerimaan. Situasi tersebut penting karena ketimpangan informasi dapat memperkuat posisi pihak yang menguasai pemasaran, sebagaimana ditunjukkan Roberts et al. (2022) dalam kajian rantai nilai perikanan berbasis hubungan patron-klien.

Ketergantungan semakin kuat melalui mekanisme pinjaman. Nelayan dapat meminjam uang, barang, alat tangkap, atau kebutuhan melaut kepada pemilik modal ketika modal sendiri tidak mencukupi. Pinjaman diberikan tanpa bunga dengan pembayaran fleksibel, tetapi nelayan yang memiliki utang harus menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman dan sebagian penerimaan digunakan untuk membayar utang. Pola ini mempertemukan fungsi pembiayaan, produksi, dan pemasaran dalam satu hubungan. Leniwati et al. (2023) dan Manzilati dan Prestianawati (2022) membantu menjelaskan mengapa pembiayaan yang mudah diakses dapat sekaligus menjadi sumber keterikatan ekonomi.

Dengan demikian, ketimpangan ekonomi di Ekas Buana tidak dipahami hanya sebagai perbedaan nominal pendapatan, melainkan sebagai perbedaan akses terhadap alat produksi, modal, kewenangan, informasi pasar, dan pilihan ekonomi. Relasi tersebut tetap bertahan karena pemilik modal membutuhkan tenaga nelayan, sementara nelayan membutuhkan pekerjaan, kapal, modal, dan akses pasar. Kerangka penghidupan berkelanjutan memperlihatkan kemampuan rumah tangga menghadapi risiko sangat dipengaruhi oleh aset, pilihan strategi, dan struktur kesempatan yang tersedia (Dharmawan & Nissa, 2020; Nissa et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk relasi patron-klien antara pemilik modal dan masyarakat nelayan serta kondisi ekonomi nelayan di Desa Ekas Buana. Fokus kajian meliputi kepemilikan alat produksi, aturan kerja, pembagian hasil, pemasaran, pinjaman, pendapatan, biaya operasional, dan strategi rumah tangga menghadapi ketidakpastian. Penelitian diarahkan pada dua pertanyaan: bagaimana relasi ekonomi dibentuk dan dipertahankan melalui mekanisme tersebut, serta bagaimana relasi itu berkaitan dengan kondisi ekonomi dan strategi penghidupan masyarakat nelayan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, praktik, relasi sosial, serta proses ekonomi yang dijalankan pemilik modal dan masyarakat nelayan. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan partisipan terhadap pengalaman sosial dalam konteks kehidupannya. Konteks penelitian ini adalah kegiatan penangkapan ikan dan hubungan ekonomi yang terbentuk di Desa Ekas Buana (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan

masyarakat yang bekerja sebagai nelayan serta hubungan ekonomi antara pemilik modal dan nelayan buruh. Fokus penelitian mencakup kepemilikan kapal dan alat tangkap, pembiayaan kegiatan melaut, aturan kerja, pembagian hasil, pemasaran hasil tangkapan, pinjaman, pendapatan, biaya operasional, dan pekerjaan sampingan.

Sumber data primer berasal dari pemilik modal dan masyarakat nelayan. Penelitian melibatkan sepuluh informan, terdiri atas dua pemilik modal dan delapan masyarakat nelayan. Informan diposisikan berdasarkan status sosialnya agar analisis berfokus pada pola hubungan, bukan identitas personal. Data primer digunakan untuk memahami pengalaman bekerja, pengaturan kegiatan melaut, mekanisme pembagian hasil, hubungan pinjaman, pemasaran hasil tangkapan, serta kondisi ekonomi rumah tangga.

Data sekunder diperoleh dari dokumen Pemerintah Desa Ekas Buana dan dokumen pendukung penelitian. Data tersebut digunakan untuk memperkuat gambaran mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sugiyono (2019) menjelaskan data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen atau sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, dokumen desa menjadi sumber pendukung bagi hasil wawancara dan observasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kepemilikan modal, aturan kerja, pembagian hasil, pemasaran ikan, pinjaman, pendapatan, biaya melaut, dan strategi memenuhi kebutuhan keluarga. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pengalaman dalam kegiatan penangkapan ikan dan hubungan dengan pemilik modal (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019). Observasi digunakan untuk memahami kegiatan ekonomi, posisi masing-masing pihak, sarana produksi, serta aktivitas melaut. Dokumentasi melengkapi data melalui dokumen desa dan bahan pendukung lainnya.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan informasi antar-informan serta mengaitkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data mengenai kepemilikan alat produksi, aturan kerja, bagi hasil, pemasaran, pinjaman, pendapatan, dan strategi ekonomi dikelompokkan berdasarkan tema penelitian. Data kemudian disajikan dalam uraian dan tabel untuk mengidentifikasi pola hubungan antar-temuan (Sugiyono, 2019).

Hasil Penelitian

Desa Ekas Buana memiliki penduduk sebanyak 3.295 jiwa berdasarkan data Pemerintah Desa tahun 2024 yang digunakan dalam penelitian. Jumlah tersebut terdiri atas 1.459 laki-laki atau 44,3% dan 1.836 perempuan atau 55,7%. Komposisi penduduk tersebut memperlihatkan perempuan merupakan kelompok penduduk yang lebih besar. Meskipun demikian, struktur mata pencaharian menunjukkan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan produksi luar rumah, termasuk pertanian dan perikanan, banyak dijalankan oleh laki-laki.

Pekerjaan nelayan tercatat dilakukan oleh 239 laki-laki atau sekitar 16,4% dari penduduk laki-laki. Angka tersebut menempatkan nelayan sebagai salah satu kelompok mata pencaharian penting di Desa Ekas Buana. Petani menjadi kelompok pekerjaan laki-laki terbesar dengan 486 orang atau 33,3%, sedangkan peternak mencapai 220 orang atau 15,1%. Data ini memberikan gambaran ekonomi desa memiliki basis yang beragam, namun kegiatan nelayan tetap mempunyai posisi

penting karena berkaitan langsung dengan kedekatan geografis desa dengan wilayah pesisir (Halim et al., 2019).

Dalam kehidupan masyarakat, kegiatan nelayan tidak berdiri sendiri. Nelayan berinteraksi dengan pemilik kapal, pemilik modal, pedagang, keluarga, dan pihak lain yang terlibat dalam proses produksi serta distribusi hasil tangkapan. Hubungan tersebut membentuk jaringan ekonomi yang memungkinkan kegiatan melaut terus berjalan. Namun, tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemilik modal memiliki akses terhadap kapal dan alat produksi yang lebih besar, sementara nelayan buruh lebih banyak mengandalkan tenaga dan keterampilan.

Penelitian menemukan adanya perbedaan antara nelayan yang memiliki sarana produksi sendiri dan nelayan yang bekerja pada pemilik modal. Nelayan dengan modal terbatas menggunakan kapal kecil, sampan, alat tangkap sederhana, dan bahan bakar yang dibiayai sendiri. Sebaliknya, nelayan buruh dapat menggunakan kapal yang lebih besar milik pemilik modal dengan kapasitas sekitar delapan sampai sepuluh orang. Perbedaan sarana tersebut berpengaruh terhadap jangkauan penangkapan dan kemampuan menghasilkan pendapatan (Nissa et al., 2018; Halim et al., 2019).

Keadaan tersebut memperlihatkan posisi sosial ekonomi nelayan dibentuk oleh akses terhadap alat produksi. Keterbatasan alat tidak berarti nelayan kehilangan kemampuan bekerja, karena tenaga dan keterampilan mereka tetap menjadi unsur utama dalam proses penangkapan. Akan tetapi, tenaga kerja tersebut membutuhkan sarana produksi agar dapat menghasilkan pendapatan. Pemilik modal berada pada posisi yang dapat menyediakan sarana tersebut. Hubungan kerja kemudian menjadi salah satu cara nelayan memperoleh akses terhadap alat produksi yang tidak mampu mereka miliki sendiri.

Relasi Kerja dan Penguasaan Sumber Daya Produksi

Relasi kerja antara pemilik modal dan masyarakat nelayan terbentuk melalui kebutuhan yang saling berhubungan. Pemilik modal tidak dapat menjalankan usaha penangkapan ikan tanpa tenaga nelayan. Nelayan juga mengalami keterbatasan untuk menjalankan kegiatan penangkapan menggunakan kapal dan alat tangkap yang lebih besar tanpa dukungan modal. Salah satu pemilik modal menyatakan tenaga masyarakat nelayan diperlukan agar usaha penangkapan dapat berjalan. Pernyataan tersebut menunjukkan hubungan tidak sepenuhnya satu arah karena pemilik modal juga membutuhkan tenaga nelayan untuk mempertahankan usaha (Humbas et al., 2021; Adisel et al., 2023) (Putri, 2020).

Walaupun terdapat kebutuhan timbal balik, kedudukan kedua pihak tidak sama. Pemilik modal berada pada posisi sebagai pihak yang menyediakan kapal, modal, dan perlengkapan kegiatan melaut. Nelayan berada pada posisi sebagai pekerja yang menjalankan kegiatan penangkapan. Perbedaan ini membuat pemilik modal memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan cara kerja. Nelayan menerima aturan yang telah ditetapkan dan menjalankan tugas sesuai kebutuhan kegiatan melaut (Chalid & Manji, 2021; Syahrizal, 2019).

Kepemilikan kapal merupakan sumber utama kewenangan pemilik modal. Kapal yang lebih besar mendorong kegiatan penangkapan dilakukan dengan jumlah nelayan lebih banyak dan jangkauan yang lebih luas. Pemilik modal juga menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan penangkapan, termasuk kebutuhan bahan bakar dan alat tangkap. Nelayan kemudian menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan sarana yang tersedia. Struktur tersebut menciptakan pembagian peran yang jelas antara pemilik sarana dan penyedia tenaga (Halim et al., 2019; Chalid & Manji, 2021).

Modal yang disediakan pemilik modal untuk kebutuhan kegiatan melaut disebut sekitar Rp500.000 dalam konteks biaya perlengkapan dan operasional tertentu. Informan menjelaskan biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan seperti bensin, oli, dan perlengkapan lainnya, sedangkan konsumsi pribadi nelayan menjadi tanggung jawab masing-masing. Data ini memperlihatkan pemilik modal memiliki kapasitas pembiayaan yang membuat nelayan dapat menjalankan kegiatan penangkapan tanpa menyediakan seluruh modal produksi dari sumber sendiri.

Nelayan yang tidak bekerja pada kapal pemilik modal memiliki bentuk modal yang lebih terbatas. Modal mereka berupa kapal kecil atau sampan, alat tangkap sederhana, dan bahan bakar. Kegiatan melaut dilakukan menggunakan sumber daya tersebut dan hasil tangkapan menjadi pendapatan. Perbedaan ukuran dan kemampuan alat produksi menghasilkan perbedaan kemampuan memperoleh hasil. Nelayan dengan sarana lebih sederhana memiliki jangkauan produksi yang lebih terbatas dan lebih sensitif terhadap perubahan kondisi laut.

Penguasaan alat produksi menjadi penting karena menentukan siapa yang dapat mengatur kegiatan produksi. Pemilik modal dapat menentukan kapal yang digunakan, jumlah pekerja, kebutuhan operasional, dan proses kerja. Nelayan dapat menjalankan pekerjaan karena memperoleh akses terhadap sarana tersebut. Ketika sarana produksi dimiliki oleh pihak lain, kemampuan nelayan untuk bekerja secara mandiri menjadi terbatas. Kondisi inilah yang menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja yang bersifat ketergantungan (Halim et al., 2019; Humbas et al., 2021).

Pemilik modal mempunyai kewenangan menetapkan aturan kerja. Informan pemilik modal menyatakan aturan dan modal berasal dari pihak pemilik, sedangkan nelayan menyiapkan tenaga untuk melaut dan membawa hasil tangkapan. Keterangan tersebut memperlihatkan aturan kerja tidak dibentuk melalui perundingan formal yang melibatkan seluruh nelayan. Nelayan lebih banyak menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang menguasai sarana produksi.

Waktu kerja nelayan berlangsung dari pagi sampai sore atau sampai memperoleh hasil tangkapan yang dianggap memadai. Durasi kerja juga menyesuaikan kondisi musim dan laut. Artinya, waktu kerja tidak sepenuhnya dapat diprediksi karena produksi perikanan dipengaruhi keadaan alam. Dalam kondisi demikian, pemilik modal membutuhkan nelayan yang siap menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi laut, sedangkan nelayan harus mengikuti kebutuhan kegiatan produksi agar tetap memperoleh kesempatan bekerja.

Kewenangan pemilik modal terlihat pula dalam proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan melaut. Nelayan menjalankan perintah terkait keberangkatan, kegiatan penangkapan, dan penyerahan hasil. Hubungan tersebut menempatkan nelayan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab operasional, tetapi ruang menentukan kebijakan ekonomi lebih terbatas. Perbedaan antara tanggung jawab produksi dan kewenangan pengambilan keputusan menjadi salah satu ciri penting relasi yang ditemukan.

Sistem bagi hasil yang ditemukan dalam penelitian menempatkan 70% hasil pada pemilik modal dan 30% pada masyarakat nelayan. Informasi tersebut disampaikan oleh informan nelayan yang menjelaskan pemilik modal memperoleh bagian lebih besar karena menyediakan modal dan perlengkapan alat penangkapan. Nelayan memperoleh bagian sebagai kompensasi atas tenaga yang diberikan dalam proses melaut. Persentase tersebut menjadi ketentuan yang berlaku dalam hubungan kerja yang diteliti (Silmi et al., 2018; Wafi et al., 2019; Syahrizal, 2019).

Sistem bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan angka persentase, tetapi melalui proses pembentukan kesepakatan. Penelitian menunjukkan pembagian hasil didominasi oleh pemilik modal dan tidak didahului kesepakatan tertulis dengan nelayan. Karena pemilik modal menguasai kapal dan modal, posisi mereka lebih kuat dalam menentukan pembagian. Nelayan menerima bagian berdasarkan sistem yang telah berjalan. Situasi ini menjadi penting karena persentase pembagian memengaruhi pendapatan yang diterima nelayan dari setiap kegiatan penangkapan (Qurrata, 2018; Wafi et al., 2019).

Nelayan menyampaikan pekerjaan melaut membutuhkan tenaga dan kelelahan yang besar, sementara hasil yang diterima tidak selalu sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Salah satu informan menyatakan pendapatan tidak menentu dan pembagian hasil dirasakan belum sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, tetapi pekerjaan tetap dilakukan karena pilihan pekerjaan yang tersedia terbatas. Pernyataan tersebut menunjukkan keputusan bekerja didasarkan pada kepuasan terhadap pembagian hasil sekaligus kebutuhan mempertahankan pendapatan.

Dari sisi pemilik modal, bagian 70% dipahami sebagai kompensasi atas penyediaan kapal, alat tangkap, dan modal operasional. Pemilik modal juga menanggung risiko apabila kegiatan melaut membutuhkan biaya tetapi hasil tangkapan rendah. Karena itu, struktur bagi hasil mempunyai dasar ekonomi yang berkaitan dengan kepemilikan modal dan risiko. Namun, penelitian memperlihatkan nelayan tidak selalu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui seluruh proses perhitungan hasil.

Sistem bagi hasil juga berhubungan dengan posisi tawar. Ketika aturan ditentukan oleh pihak yang menguasai modal, pihak lain memiliki ruang terbatas untuk mengubah ketentuan. Ketidaksetaraan tersebut dapat bertahan karena nelayan membutuhkan pekerjaan dan pemilik modal membutuhkan tenaga. Hubungan kerja kemudian menjadi stabil meskipun masing-masing pihak memiliki penilaian yang berbeda terhadap keadilan pembagian hasil (Adisel et al., 2023; Syahrizal, 2019).

Tabel 1. Mekanisme Relasi Ekonomi Pemilik Modal dan Nelayan

Aspek Relasi	Temuan Lapangan	Posisi Pemilik Modal	Posisi Nelayan
Kepemilikan sarana	Kapal dan alat tangkap utama dikuasai pemilik modal	Menguasai sarana produksi	Mengakses sarana sebagai pekerja
Modal operasional	Modal kegiatan melaut disediakan pemilik modal untuk kebutuhan tertentu	Menanggung penyediaan modal produksi	Menyumbangkan tenaga dan keterampilan
Aturan kerja	Aturan kerja umumnya disampaikan secara lisan	Menentukan aturan dan keputusan kerja	Menjalankan aturan
Bagi hasil	70% pemilik modal dan 30% nelayan	Menerima bagian lebih besar	Menerima bagian lebih kecil
Pemasaran	Hasil tangkapan dijual pemilik modal ke luar desa	Menguasai akses pasar dan informasi	Memiliki akses terbatas terhadap proses penjualan

Pinjaman	Pinjaman diberikan untuk kebutuhan melaut dan rumah tangga	penjualan Pemberi pinjaman	Penerima pinjaman dan terikat pada kewajiban penjualan
Hubungan sosial	Hubungan didukung kepercayaan dan komunikasi	Membangun loyalitas kerja	Mempertahankan hubungan untuk akses pekerjaan dan bantuan

Sistem Bagi Hasil, Pemasaran, dan Ketergantungan Ekonomi

Hasil tangkapan masyarakat nelayan pada umumnya diserahkan kepada pemilik modal setelah kegiatan melaut. Pemilik modal kemudian membawa hasil tersebut ke luar desa untuk dijual. Nelayan tidak selalu mengikuti proses penjualan sehingga informasi mengenai harga dan jumlah penerimaan berada lebih banyak pada pemilik modal. Struktur pemasaran tersebut membuat pemilik modal berperan sebagai penghubung antara nelayan dan pasar (Roberts et al., 2022; Stacey et al., 2021).

Keterbatasan akses terhadap informasi pasar merupakan bagian penting dari posisi tawar nelayan. Harga ikan dapat berubah sesuai jenis ikan, jumlah pasokan, lokasi penjualan, dan kondisi pasar. Ketika nelayan tidak mengetahui secara langsung harga jual, mereka memiliki keterbatasan dalam menilai apakah bagian yang diterima sesuai dengan nilai hasil tangkapan (Roberts et al., 2022; Anna et al., 2019).

Salah satu nelayan menyampaikan ketika upah yang diterima tidak sesuai dengan hasil tangkapan, muncul rasa tidak percaya terhadap proses penjualan. Informan juga menyebut pemilik modal yang pergi keluar desa untuk menjual ikan memiliki keuntungan karena nelayan tidak dapat mengawasi seluruh proses. Pernyataan ini dibaca sebagai pengalaman dan persepsi informan, bukan sebagai pembuktian independen atas setiap transaksi penjualan. Informasi tersebut menunjukkan adanya persepsi tentang kurangnya transparansi, bukan kesimpulan bahwa setiap pemilik modal melakukan penyimpangan. Hal lain juga adanya ketimpangan akses informasi. Pemilik modal menguasai proses pemasaran, sedangkan nelayan memiliki kemampuan pengawasan yang terbatas.

Roberts et al. (2022) menunjukkan posisi dalam rantai nilai perikanan dapat memengaruhi manfaat ekonomi yang diterima aktor. Aktor yang menghubungkan pembiayaan, produksi, dan pemasaran dapat memiliki posisi strategis dalam menentukan aliran hasil. Temuan di Ekas Buana menunjukkan pemilik modal berada pada posisi tersebut karena menyediakan modal, memiliki kapal, menerima hasil tangkapan, dan menjualnya ke luar desa (Roberts et al., 2022).

Pinjaman merupakan mekanisme penting dalam hubungan pemilik modal dan nelayan. Ketika modal sendiri tidak cukup untuk kegiatan melaut, nelayan dapat meminjam uang, alat tangkap, barang, atau kebutuhan operasional kepada pemilik modal. Pinjaman digunakan untuk menjaga agar kegiatan produksi tetap berjalan dan kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Dalam penelitian, kebutuhan tersebut semakin terasa pada musim paceklik atau ketika cuaca buruk membuat nelayan tidak dapat melaut (Leniwati et al., 2023; Manzilati & Prestianawati, 2022).

Informan nelayan menjelaskan pinjaman dapat digunakan untuk membeli kebutuhan melaut maupun memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pinjaman tersebut memberikan manfaat langsung. Pemilik modal memberikan pinjaman tanpa bunga dan nelayan dapat membayarnya secara fleksibel. Hal tersebut merupakan bentuk bantuan yang memudahkan mereka melewati periode pendapatan rendah. Namun, pinjaman tersebut memiliki konsekuensi terhadap hubungan pemasaran.

Nelayan yang memperoleh pinjaman harus menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman. Sebagian hasil penerimaan kemudian dipotong untuk pembayaran utang. Dengan demikian, hubungan pembiayaan sekaligus menjadi hubungan produksi dan pemasaran. Satu transaksi ekonomi menciptakan kewajiban yang memengaruhi transaksi berikutnya (Roberts et al., 2022; Leniwati et al., 2023).

Manzilati dan Prestianawati (2022) menunjukkan pembiayaan informal dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Kemudahan akses menjadi salah satu alasan pembiayaan informal tetap digunakan. Dalam konteks Ekas Buana, kemudahan tersebut terlihat dari hubungan langsung antara nelayan dan pemilik modal. Nelayan tidak perlu melalui prosedur formal yang panjang untuk memperoleh bantuan ketika kebutuhan mendesak muncul.

Ketergantungan terbentuk ketika sumber daya yang dibutuhkan nelayan hanya dapat diperoleh melalui hubungan tertentu. Pemilik modal menjadi sumber modal, pekerjaan, alat produksi, dan pemasaran. Nelayan kemudian mempunyai alasan ekonomi untuk mempertahankan hubungan tersebut. Ketika hubungan dihentikan, akses terhadap kapal, pinjaman, atau pasar dapat ikut terputus. Karena itu, utang bukan sekadar transaksi keuangan, tetapi menjadi bagian dari jaringan sosial ekonomi yang mengikat kedua pihak (Al-Ayubi et al., 2017; Adisel et al., 2023).

Informan menyebutkan pendapatan dari kegiatan melaut berada pada kisaran Rp100.000–Rp150.000 per hari. Besarnya pendapatan bergantung pada jumlah hasil tangkapan dan kondisi cuaca. Kisaran tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan melaut dan belum secara otomatis menggambarkan pendapatan bersih rumah tangga. Nelayan masih harus memperhitungkan biaya operasional serta kebutuhan keluarga lainnya (Junaidi et al., 2020; Wafi et al., 2019).

Biaya operasional yang disebutkan dalam penelitian sekitar Rp100.000 per hari, terutama untuk membeli bensin bagi mesin kapal. Biaya tersebut ditanggung dari hasil pendapatan nelayan. Dengan demikian, ketika pendapatan berada pada kisaran bawah, sebagian besar penerimaan dapat terserap untuk mempertahankan kegiatan produksi. Selisih antara pendapatan dan biaya operasional menjadi sangat terbatas pada saat hasil tangkapan rendah (Junaidi et al., 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan ukuran pendapatan harian tidak dapat dipisahkan dari struktur biaya. Selain itu, rumah tangga masih membutuhkan pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan sosial. Karena itu, pendapatan melaut belum selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Ketidakpastian tersebut semakin besar ketika cuaca buruk. Nelayan tidak dapat melaut ketika angin kencang, hujan, atau ombak membahayakan keselamatan. Ketika tidak melaut, tidak ada penerimaan dari kegiatan penangkapan, sedangkan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Situasi ini menghasilkan tekanan ekonomi yang mendorong nelayan mencari pinjaman atau pekerjaan alternatif. Ketergantungan pada alam menjadi salah satu faktor yang memperkuat kerentanan ekonomi rumah tangga (Gravitiani et al., 2018; Rahman et al., 2021; Warren & Steenbergen, 2021).

Bagi nelayan yang bekerja pada pemilik modal, pendapatan juga dipengaruhi oleh sistem bagi hasil. Bagian 30% menjadi sumber penerimaan tenaga kerja, sedangkan 70% berada pada pemilik modal. Karena hasil tangkapan berubah-ubah, jumlah nominal yang diterima nelayan juga berubah. Ketika tangkapan rendah, bagian 30% menjadi semakin kecil. Dengan demikian, ketidakpastian alam dan struktur distribusi hasil bekerja secara bersamaan dalam menentukan kondisi ekonomi nelayan.

Tabel 2. Indikator Kondisi Ekonomi Masyarakat Nelayan

Indikator	Temuan Penelitian	Keterangan
Frekuensi melaut	Umumnya 1 kali per hari; dapat 2 kali ketika cuaca mendukung	Sangat dipengaruhi musim dan kondisi laut
Pendapatan melaut	Sekitar Rp100.000–Rp150.000 per hari	Bergantung pada jumlah tangkapan dan cuaca
Biaya operasional	Sekitar Rp100.000 per hari	Terutama untuk bahan bakar mesin kapal
Bagi hasil	70% pemilik modal; 30% nelayan	Ditentukan dalam relasi kerja yang didominasi pemilik modal
Pinjaman	Uang, alat tangkap, dan barang kebutuhan melaut	Dibayar melalui hasil penerimaan; hasil tangkapan dijual kepada pemberi pinjaman
Strategi tambahan	Bertani, buruh bangunan, menabung, KUR	Dilakukan untuk menghadapi pendapatan tidak menentu

Kegiatan penangkapan ikan sangat bergantung pada kondisi alam. Nelayan menentukan waktu melaut berdasarkan keadaan laut. Ketika cuaca baik, frekuensi melaut dapat meningkat. Ketika cuaca buruk, kegiatan dapat dihentikan untuk menghindari risiko keselamatan. Ketergantungan tersebut membuat nelayan tidak mempunyai kontrol penuh terhadap jumlah hari kerja. Berbeda dengan pekerjaan yang mempunyai jadwal tetap, nelayan tidak selalu dapat menentukan kapan produksi dilakukan (Azizi et al., 2017; Hafsaridewi et al., 2019) (Worowirasmu & Artiningsih, 2018).

Perubahan musim juga memengaruhi jumlah tangkapan. Pada musim tertentu hasil tangkapan dapat lebih banyak, sedangkan pada musim paceklik hasil menurun. Ketika hasil menurun, pendapatan rumah tangga ikut berkurang. Ketidakpastian tersebut membuat nelayan sulit merencanakan penerimaan bulanan. Ketergantungan terhadap cuaca menjadi lebih berat bagi nelayan yang tidak mempunyai modal cadangan. Ketika tidak melaut, mereka tidak memperoleh pendapatan dari sumber utama. Pada saat yang sama, kebutuhan keluarga tetap berjalan. Kondisi ini mendorong penggunaan tabungan jika tersedia atau pinjaman apabila dana cadangan tidak mencukupi. Pemilik modal kemudian mempunyai posisi penting sebagai salah satu sumber bantuan ekonomi pada masa sulit (Nissa et al., 2019; Dharmawan & Nissa, 2020).

Ketergantungan alam juga menjelaskan mengapa pekerjaan alternatif menjadi penting. Nelayan yang memiliki lahan dapat bekerja di ladang, sedangkan nelayan lain dapat menjadi buruh bangunan. Pekerjaan tersebut dilakukan ketika tidak melaut atau ketika musim paceklik. Diversifikasi tersebut bukan berarti nelayan meninggalkan pekerjaan utama, tetapi merupakan cara mengurangi tekanan ketika pendapatan perikanan menurun (Nissa et al., 2018; Saksono et al., 2023; Suadi et al., 2021). Salah satu strategi yang ditemukan adalah menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Informan menjelaskan sebagian uang dari hasil melaut disimpan untuk kebutuhan mendadak dan kebutuhan modal kegiatan melaut. Tabungan berfungsi sebagai cadangan ketika biaya produksi atau kebutuhan keluarga muncul di luar rencana

Pekerjaan sampingan juga menjadi strategi utama. Nelayan yang mempunyai lahan dapat bekerja di ladang, terutama ketika musim tidak memungkinkan untuk melaut. Nelayan yang tidak mempunyai lahan dapat bekerja sebagai buruh bangunan. Pekerjaan tersebut menghasilkan pendapatan tambahan walaupun tidak selalu tersedia. Diversifikasi ini membantu rumah tangga mempertahankan konsumsi ketika pendapatan dari laut menurun (Stacey et al., 2019; Subair et al., 2023; Saksono et al., 2023) (Campbell et al., 2021).

Kondisi Ekonomi dan Strategi Rumah Tangga Nelayan

Perbedaan kepemilikan alat produksi menghasilkan perbedaan posisi sosial dalam kegiatan kerja. Pemilik modal memiliki sumber daya yang memungkinkan mereka menentukan siapa yang bekerja, bagaimana kegiatan dilakukan, dan ke mana hasil tangkapan dipasarkan. Nelayan memiliki posisi sebagai pelaksana kegiatan produksi. Perbedaan tersebut membuat hubungan kerja sekaligus menjadi hubungan kekuasaan karena keputusan ekonomi lebih banyak berada pada pihak yang menguasai modal (Hendriwani, 2020; Chalid & Manji, 2021).

Ketimpangan juga tampak pada akses informasi. Pemilik modal mengetahui proses pemasaran dan harga yang diperoleh di luar desa, sementara nelayan tidak selalu mengikuti penjualan. Informasi tersebut memiliki nilai ekonomi karena menentukan penilaian terhadap hasil tangkapan. Ketika informasi terkonsentrasi pada satu pihak, pihak lain memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini dapat memunculkan rasa tidak percaya dan memperkuat posisi pihak yang menguasai informasi (Roberts et al., 2022; Anna et al., 2019).

Pinjaman memperluas pengaruh pemilik modal ke dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan tidak berhenti pada kegiatan produksi, tetapi dapat mencakup kebutuhan sehari-hari ketika musim paceklik. Pemilik modal menjadi sumber bantuan pada saat pendapatan rendah. Nelayan kemudian mempunyai kewajiban membayar dan mempertahankan hubungan pemasaran. Hubungan ekonomi menjadi hubungan sosial karena menyentuh kebutuhan keluarga dan keberlangsungan pekerjaan (Al-Ayubi et al., 2017; Leniwati et al., 2023).

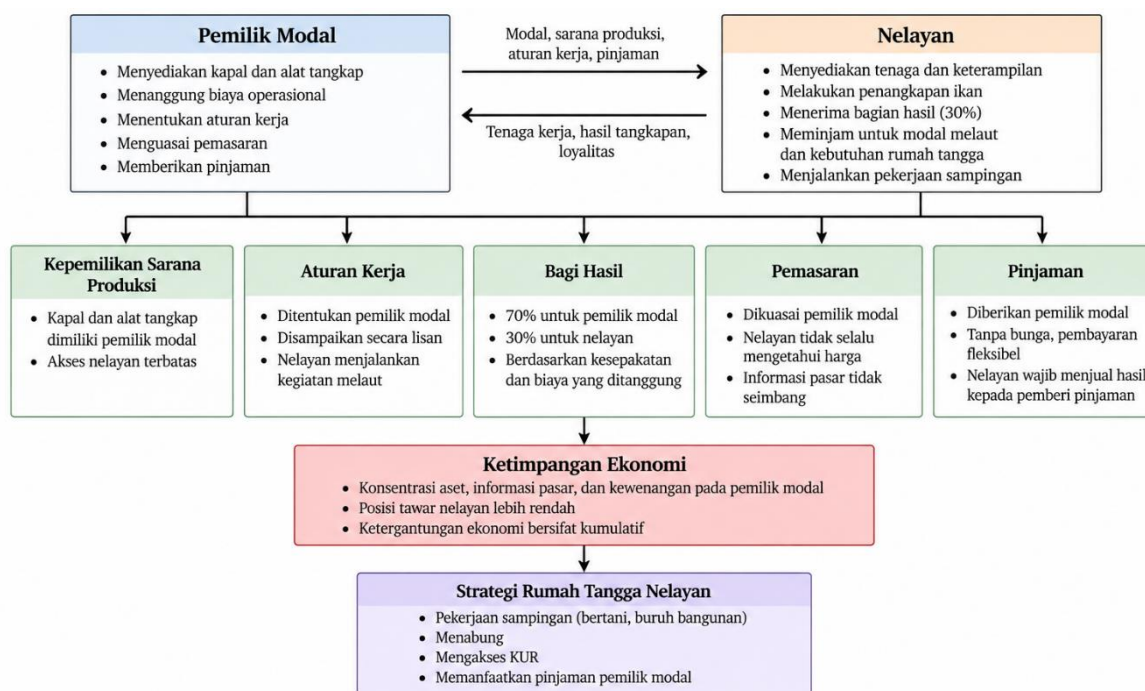
Ketergantungan tersebut juga berkaitan dengan rasa terima kasih dan kewajiban sosial. Informan menyatakan bantuan pemilik modal membuat nelayan merasa terbantu dan mempunyai ikatan untuk menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman. Dalam hubungan patron-klien, pertukaran material sering disertai pertukaran sosial. Patron menyediakan bantuan, sedangkan klien memberikan loyalitas dan kepatuhan. Al-Ayubi et al. (2017) menunjukkan pola tersebut dapat menjadi kelembagaan lokal yang bertahan melalui hubungan timbal balik (Al-Ayubi et al., 2017; Adisel et al., 2023; Leniwati et al., 2023).

Ketika pendapatan nelayan tidak mencukupi, kebutuhan modal dan kebutuhan rumah tangga mendorong penggunaan pinjaman. Pinjaman memperkuat hubungan karena pembayaran dilakukan melalui hasil tangkapan dan nelayan harus menjual kepada pemberi modal. Hubungan yang semula terbentuk melalui pekerjaan kemudian berkembang menjadi hubungan pembiayaan dan pemasaran. Dengan demikian, ketergantungan bukan muncul dari satu mekanisme, tetapi dari kombinasi kepemilikan alat produksi, pekerjaan, pinjaman, dan pasar (Manzilati & Prestianawati, 2022; Leniwati et al., 2023; Roberts et al., 2022).

Strategi ekonomi nelayan memperlihatkan mereka tidak sepenuhnya pasif. Mereka melakukan pekerjaan di ladang, menjadi buruh bangunan, menabung, dan mengakses KUR. Strategi tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan karena pekerjaan alternatif tidak selalu tersedia dan

modal cadangan terbatas. Dengan demikian, ketahanan ekonomi rumah tangga masih dipengaruhi oleh struktur kesempatan yang ada di sekitar mereka (Stacey et al., 2019; Suadi et al., 2021; Subair et al., 2023; Saksono et al., 2023).

Gambar 1. Mekanisme Relasi Patron-Klien dan Ketimpangan Ekonomi Nelayan



Kesimpulan

Relasi ekonomi pemilik modal dan nelayan di Desa Ekas Buana bercorak patron-klien resiprokal tetapi asimetris. Pemilik modal membutuhkan tenaga dan keterampilan nelayan, sedangkan nelayan membutuhkan kapal, alat tangkap, modal operasional, pekerjaan, dan pemasaran. Asimetri bersumber dari pemusatan sarana produksi, kewenangan menetapkan aturan, informasi pemasaran, dan kemampuan memberikan pinjaman pada pemilik modal.

Dominasi meliputi penguasaan kapal, alat tangkap, pemasaran, aturan kerja lisan, serta pembagian hasil 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk nelayan. Keterbatasan informasi harga dan penjualan menimbulkan ketidakpercayaan sebagian informan. Meskipun dilaporkan dugaan kurangnya transparansi penjualan, temuan terkuat adalah ketimpangan informasi dan kemampuan pengawasan. Ketergantungan diperkuat pinjaman uang, barang, alat tangkap, dan kebutuhan melaut, terutama saat paceklik. Pinjaman tanpa bunga dengan pembayaran fleksibel membantu nelayan, tetapi mewajibkan penjualan tangkapan kepada pemilik modal dan alokasi sebagian penerimaan untuk utang. Pembiayaan terikat pada produksi dan pemasaran.

Strategi nelayan mencakup bekerja di ladang, menjadi buruh bangunan, menabung, mengakses KUR, dan memanfaatkan pinjaman pemilik modal. Adaptasi ini belum menghapus ketergantungan karena keterbatasan akses kapal, alat produksi, dan pasar. Penguatan posisi nelayan memerlukan perluasan pilihan modal, pemasaran, pekerjaan, dan kelembagaan ekonomi.

Referensi

- Al-Ayubi, M. H., Sholihin, A., & Diniah. (2017). Kelembagaan patron-klien dalam masyarakat nelayan di Cilauteureun Pameungpeuk Kabupaten Garut. Repository IPB University.
- Adisel, A., Suryati, S., & Riswanto, R. (2023). Portraying Patron-client in Fishermen Work Relationships: A Phenomenon from Bengkulu, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(1), 25–36. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.1.10852>
- Anna, Z., Yusuf, A. A., Alisjahbana, A. S., Ghina, A. A., & Rahma. (2019). Are fishermen happier? Evidence from a large-scale subjective well-being survey in a lower-middle-income country. *Marine Policy*, 106, 103559. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103559>
- Azizi, Putri, E. I. K., & Fahrudin, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan nelayan akibat variabilitas iklim. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(2), 225–233.
- Campbell, S. J., Jakub, R., Valdivia, A., Setiawan, H., Setiawan, A., Cox, C., Kiyo, A., Darman, Djafar, L. F., de la Rosa, E., Suherfian, W., Yuliani, A., Kushardanto, H., Muawanah, U., Rukma, A., Alimi, T., & Box, S. (2021). Immediate impact of COVID-19 across tropical small-scale fishing communities. *Ocean & Coastal Management*, 200, 105485. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105485>
- Chalid, A., & Manji, T. (2021). Strategi kelompok nelayan dalam mereduksi politik patron klien di Kabupaten Maros. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 60–69. <https://doi.org/10.31764/jiap.v9i1.3245>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dharmawan, A. H., & Nissa, Z. N. A. (2020). Rural livelihood vulnerability and resilience: A typology drawn from case studies of small-scale farmers and fishermen in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.22500/8202028458>
- Gravitiani, E., Fitriana, S. N., & Suryanto. (2018). Community livelihood vulnerability level in northern and southern coastal area of Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 202(1), 012050. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012050>
- Habibuddin, H., Hanapi, H., & Burhanuddin, B. (2023). Pelestarian lingkungan pesisir melalui ritual Nyalamaq Dilauq di Desa Tanjung Luar Keruak Lombok Timur. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 7(1), 130–141. <https://doi.org/10.29408/geodika.v7i1.17516>
- Hafsaridewi, R., Fahrudin, A., Sulistiono, Sutrisno, D., & Koeshendrajana, S. (2019). Resiliensi nelayan terhadap ketersediaan sumberdaya perikanan di Kepulauan Karimunjawa. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 9(2), 527–540. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.527-540>
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Sondita, M. F. A., White, A. T., Koeshendrajana, S., Ruchimat, T., Pomeroy, R. S., & Yuni, C. (2019). Developing a functional definition of small-scale fisheries in support of marine capture fisheries management in Indonesia. *Marine Policy*, 100, 238–248. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.044>
- Hendriwani, S. (2020). Teori kelas sosial dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26617>

- Humbas, J. G., Massie, J. D. D., & Wangke, S. J. C. (2021). A study of patron-client relationship between fisherman and supplier in Kema. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.34741>
- Junaidi, Zaitul, Sefnedi, & Suherman, H. (2020). The determinants of small-scale fishermen's income in Padang City, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(3), 677–682. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.3.35>
- Leniwati, D., Widyastuti, A., Sholana, R., Latifah, S. W., & Mawardi, F. D. (2023). Interpreting the concept of debt based on Indonesian patron-client perspective. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 5(2), 215–232. <https://doi.org/10.33005/jasf.v5i2.291>
- Manzilati, A., & Prestianawati, S. A. (2022). Informal financing or debt traps: Are the UN sustainable development goals being met in emerging economies? Review of International Business and Strategy, 32(1), 132–145. <https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2021-0011>
- Nissa, Z. N. A., Suadi, & Sukardi. (2018). Livelihood analysis of floating net cages fish farmers at Sendang Village Sub-district of Gajah Mungkur Reservoir of Wonogiri Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 139(1), 012033. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/139/1/012033>
- Nissa, Z. N. A., Dharmawan, A. H., & Saharuddin. (2019). Vulnerability analysis of small fishermen's household livelihoods in Tegal City. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.18583>
- Putri, S. H. (2020). Hubungan kerja antara juragan dan anak bagan dalam kehidupan nelayan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 15–28. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2012>
- Qurrata, V. A. (2018). Patron client: Kontrak semi mudharabah dalam teori keagenan di perikanan laut. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Rahman, M. S., Toiba, H., & Huang, W.-C. (2021). The impact of climate change adaptation strategies on income and food security: Empirical evidence from small-scale fishers in Indonesia. *Sustainability*, 13(14), 7905. <https://doi.org/10.3390/su13147905>
- Roberts, N., Mengge, B., Utina, M. R., Muhatar, F., Anugerah, Iwardanhi, A., Zulkifli, R. M., & Humphries, A. (2022). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, 143, 105142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>
- Rukin. (2020). Pembangunan perekonomian masyarakat desa pesisir sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.1998>
- Saksono, H., Nissa, Z. N. A., & Suadi. (2023). Small-scale fisher's livelihood strategies: Findings from case studies in several Indonesian coastal areas. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 25(1), 9–18. <https://doi.org/10.22146/jfs.82815>
- Silmi, A. N. N., Wiyono, E. S., & Wisudo, S. H. (2018). Pola bagi hasil tangkapan ikan nelayan pancing di Ciselok. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 2(1), 79–91. <https://doi.org/10.29244/core.2.1.79-91>
- Stacey, N., Acciaioli, G., Clifton, J., & Steenbergen, D. (2017). Impacts of marine protected areas on livelihoods and food security of the Bajau as an indigenous migratory people in maritime Southeast Asia. In L. Westlund, A. Charles, S. M. Garcia, & J. Sanders (Eds.), *Marine protected areas: Interactions with fishery*

- livelihoods and food security (pp. 113–126). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D., & Fitriana, R. (2019). Enhancing coastal livelihoods in Indonesia: An evaluation of recent initiatives on gender, women and sustainable livelihoods in small-scale fisheries. *Maritime Studies*, 18, 359–371. <https://doi.org/10.1007/s40152-019-00142-5>
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>
- Suadi, Nissa, Z. N. A., Widayana, R. I., Atmojo, B. K. D., Saksono, H., & Jayanti, A. D. (2021). Livelihood strategies of two small-scale fisher communities: Adaptation strategies under different fishery resource at southern and northern coast of Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 919(1), 012010. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/919/1/012010>
- Subair, N., Pidani, R. R., Meiyani, E., Haris, R., & Irma. (2023). Livelihood strategies for widows and divorcees of coastal fishers in Indonesia. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.25788>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suleman, A., Pratiknjo, M. H., & Sandiah, N. (2019). Kemiskinan struktural dan hubungan patron klien nelayan di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Holistik*, 12(2).
- Syahrizal. (2019). Fishermen and inequality: Study about profit sharing system in fisherman society. *Proceedings of the First International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281308>
- Wafi, H., Yonvitner, & Yulianto, G. (2019). Fishermen income and welfare from the profit sharing system in the Sunda Strait. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/10.29244/jppt.v3i2.30164>
- Widihastuti, R., & Rosyidah, L. (2018). Sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(1). <https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6859>
- Worowirasmi, T. S., & Artiningsih. (2018). Fisherman livelihood effects on marine conservation area towards sustainable development. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 3(1), 44–55. <https://doi.org/10.14710/ijpd.3.1.44-55>
- Warren, C., & Steenbergen, D. J. (2021). Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case. *Ocean & Coastal Management*, 202, 105498. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105498>